

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan, di bawah ini dikemukakan tentang permasalahan, tinjauan terhadap sistim guru kelas dan guru bidang di Sekolah Dasar (SD) dan organisasi kelas yang diterapkan dalam studi ini.

1. Permasalahan

Dewasa ini organisasi kelas SD di Indonesia dan sebagian besar dunia, pada umumnya menerapkan sistim guru kelas. Sistim guru kelas yaitu suatu organisasi kelas yang terdiri dari sejumlah murid dalam suatu kelas tertentu yang diajar oleh seorang guru utama dalam berbagai mata pelajaran atau bidang studi, kecuali Pendidikan Agama dan kadang-kadang Pendidikan Olah Raga, yang diselenggarakan minimal dalam waktu satu caturwulan. Berbeda dengan di SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung, sistim guru bidanglah yang diterapkan. (Laporan SD, PPSP IKIP Bandung, 1974). Sistim guru bidang yaitu suatu organisasi kelas yang terdiri dari sejumlah murid dalam suatu kelas tertentu yang diajar oleh beberapa orang guru masing-masing dalam mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang diselenggarakan minimal dalam waktu satu caturwulan. Beberapa pertimbangan mengapa sekolah tersebut menerapkan sistim guru bidang, terdapat tiga hal.

Pertama, berkenaan dengan penggunaan kurikulum baru. SD PPSP IKIP Bandung yang berasal dari Laboratory Schools IKIP Bandung, pada permulaannya yaitu pada caturwulan kedua tahun 1972 menggunakan Kurikulum SD 1968 yang dilengkapi dengan pelajaran Bahasa Inggris yang mulai diberikan di kelas IV (Laporan SD, Laboratory Schools IKIP Bandung, 1972). Dengan perubahan nama dan sta-

tus, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Tempat Pembinaan Keterampilan/Perintis Sekolah Pembangunan Jawa Barat No.025/SP/TPK-PPSP/1972-1973 tentang "intensifikasi pelaksanaan implementasi Sekolah Pembangunan Perintis IKIP Bandung", maka diadakanlah perubahan Kurikulum SD PPSP IKIP Bandung dengan kurikulum baru, yang disusun oleh PPSP Jawa Barat. Kurikulum baru itu terdiri dari berbagai bidang studi dalam bentuk " broad field " atau perpaduan beberapa mata pelajaran yang sejenis ke dalam suatu bidang studi tertentu (Nasution, 1971/72, 44). Kurikulum baru itu berbeda dengan Kurikulum Laboratory Schools yang masih terdiri dari mata pelajaran-mata pelajaran yang terpisah-pisah. Penggunaan kurikulum baru menuntut guru-guru untuk mempelajarinya secara serempak dalam waktu yang relatif singkat. Mempelajari suatu kurikulum dalam waktu yang singkat secara menyeluruh dan mendalam supaya segera dapat dipergunakan dirasakan guru-guru sebagai suatu tugas yang berat dan kurang efektif. Karena itu sekolah mengambil kebijaksanaan, guru-guru ditugaskan untuk mempelajari kurikulum baru secara keseluruhan dan sepiantas tetapi diwajibkan mempelajari lebih mendalam mengenai salah satu atau dua bidang studi yang sesuai dengan latar belakang dan minat masing-masing yang disesuaikan pula dengan keperluan sekolah (Wawancara dengan Direktur Sekolah 1973).

Kedua, sistim penataran guru. Guru-guru yang akan mengajarkan kurikulum baru itu ditatar. Mula-mula mereka memperoleh penataran secara umum mengenai status dan program sekolah, kerangka kurikulum baru, Metodologi Pengajaran, Teknik-teknik Evaluasi, Administrasi Pendidikan dan Bimbingan dan Penyuluhan. Penataran khusus diberikan kepada mereka mengenai salah satu bidang studi dan kadang-kadang ada yang dua bidang yang disesuaikan dengan pilihan dan minat mereka.

Dengan cara ini terjadilah kelompok-kelompok guru yang ditatar dalam bidang studi-bidang studi tertentu secara luas dan mendalam dan tidak ditatar sebagai guru kelas I, II atau kelas V.

Ketiga, sistim pembinaan guru. Guru-guru yang telah ditatar, dibina oleh koordinator bidang studi yang bersangkutan yang ditugaskan oleh Proyek Perintis. Pembinaan dilakukan menurut bidang studi masing-masing dan tidak dibina dalam keseluruhan bidang studi yang akan diajarkan untuk suatu kelas tertentu. Mereka dibina baik dalam menyusun program studi maupun dalam penulisan soal-soal ujian sekolah.

Atas dasar ketiga pertimbangan itu, caturwulan ketiga tahun 1972 diadakanlah "Crash Programme" untuk pemakaian kurikulum baru dengan menerapkan sistim guru bidang. Tahun ajaran 1973, seluruh kelas di SD PPSP IKIP Bandung menerapkan sistim guru bidang.

Satu tahun penerapan sistim guru bidang telah berjalan. Terdapat kesan-kesan mendangkai baik yang dikemukakan murid, guru maupun pimpinan sekolah. Murid-murid merasa lebih senang belajar dengan penerapan sistim guru bidang (Hasil wawancara dengan beberapa murid). Guru-guru merasa lebih menguasai satu bidang studi untuk mengajar di beberapa kelas dari pada mengajarkan semua pelajaran kepada sebuah kelas terus menerus (Laporan guru-guru dalam rapat sekolah akhir tahun 1973). Pimpinan Sekolah yaitu kepala sekolah dan wakilnya merasa tidak terlalu merugikan murid-murid apabila ada seorang atau dua orang guru yang tidak hadir. Apabila pada suatu hari murid-murid terpaksa bebas, tidak pada seluruh pelajaran melainkan terbatas pada pelajaran yang gurunya tidak datang. Tetapi pimpinan sekolah dan guru-guru pada awal pelajaran bahkan setelahnya terus sibuk

mengurus jadwal pelajaran untuk menyesuaikan tugas mereka masing-masing. (Hasil observasi di SD PPSP IKIP Bandung, tahun 1973).

Kesan-kesan mendangkal itu memberikan petunjuk bahwa penerapan sistim guru bidang dirasakan lebih baik dari pada sistim guru kelas. Lebih baik dalam arti bahwa sistim guru bidang memberikan suasana belajar-mengajar yang lebih menyenangkan secara sepintas. Namun demikian, dibalik suasana yang baru yang tampaknya lebih menyenangkan, terdapat keragu-raguan yaitu apakah penerapan sistim guru bidang benar-benar lebih baik dari pada sistim guru kelas yang berlaku umum di SD dewasa ini ? Bukanlah bahwa kesan-kesan itu hanyalah kesan mendangkal sebagai akibat sekolah yang inovatif (Thomas, 1973, 114), yang sebenarnya mungkin merupakan masalah yang dapat merugikan murid-murid dan dunia pengajaran pada umumnya ? Secara khusus masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah penerapan sistim guru bidang tidak mengurangi kemajuan rata-rata prestasi belajar murid-murid bila dibandingkan dengan sistim guru kelas di SD ? Apakah penerapan sistim guru bidang tidak mengurangi kegairahan belajar murid-murid bila dibandingkan dengan sistim guru kelas di SD ? Apakah penerapan sistim guru bidang tidak mengurangi semangat bekerja guru-guru beserta pimpinan sekolah bila dibandingkan dengan penerapan sistim guru kelas di SD ? Apakah penerapan sistim guru bidang tidak ditolak oleh para orang tua murid yang anak-anaknya menjadi murid sekolah yang menerapkan sistim tersebut ? Apakah di sekolah yang menerapkan sistim guru kelas tidak akan mengurangi kegairahan belajar murid-murid bila pada sekolah mereka akan diterapkan sistim guru bidang ? Apakah pada se-

kolah yang menerapkan sistim guru kelas tidak akan mengurangi semangat bekerja guru-guru dan pimpinan sekolah bila pada sekolah mereka akan diterapkan sistim guru bidang ? Apakah tidak akan mengurangi semangat bekerja calon - calon guru SD yang akan segera memunaikan tugasnya sebagai guru bila nanti di SD akan diterapkan sistim guru bidang ? Bagaimanakan perkembangan penerapan sistim guru bidang di ke delapan SD PPSP-PPSP di Indonesia ? Bagaimanakah gambaran singkat tentang pengadministrasian sekolah yang menerapkan sistim guru bidang di SD ?

Apabila yang terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan itu ternyata memberikan jawaban yang lebih buruk dari pada pengaruh penerapan sistim guru kelas, alangkah berbahayanya. Berbahaya baik bagi murid-murid yang bersekolah di SD PPSP IKIP Bandung dan Semarang maupun kemungkinan penyebaran ke SD-SD lainnya. Penyebaran mungkin terjadi dikarenakan bahwa penerapan sistim guru bidang itu diadministrasikan di sekolah-sekolah perintis yang sifatnya nasional yang diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dan benar. Sekolah-sekolah tempat penerapan sistim tersebut banyak dikunjungi tamu baik dari dalam maupun luar negeri (Buku Tamu SD PPSP IKIP Bandung 1974) (Keterangan Direktur Sekolah 1974). Lebih-lebih lagi apabila mereka yang bergerak dalam bidang pendidikan di SD itu membaca Master Design Pembaharuan Pendidikan melalui PPSP di Indonesia yang memberikan kemungkinan untuk menerapkan sistim guru bidang di SD. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang kurang baik, penerapan sistim guru bidang tidak menunjang pembangunan, khususnya pembangunan dalam bidang pendidikan yang telah digariskan Pemerintah Indonesia (Pelita II Bab XXII). Itulah permasalahan yang timbul dalam studi tentang sistim guru bidang dan kemungkinan penerapannya di SD dibandingkan de-

ngan sistim guru kelas yang berlaku di Indonesia dewasa ini

2. Tinjauan Terhadap Sistim Guru Kelas dan Sistim Guru Bidang di SD

Untuk memperoleh gambaran tentang perlunya mengadakan studi tentang masalah sistim guru bidang dan kemungkinan penerapannya dibandingkan dengan sistim guru kelas, ada baiknya mengadakan tinjauan singkat tentang hal yaitu kedudukan masalah sistim guru bidang dalam rangka pembaharuan pendidikan di Indonesia dewasa ini, tinjauan Administrasi Pendidikan dan studi-studi yang terdahulu tentang masalah penerapan sistim guru bidang di SD.

2.1 Kedudukan masalah sistim guru bidang dalam rangka pembaharuan pendidikan di Indonesia

Pembaharuan pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Semenjak ia merdeka bahkan jauh sebelumnya telah dirintis. Di masa penjajahan Belanda misalnya, dikenal usaha usaha Ki Hadjar Dewantara dengan mengemukakan sistim among dan usaha Mochammad Safei dengan menyelenggarakan Sekolah Kerja di Kayu Tanam. Di zaman merdeka pun telah berkali-kali diadakan perubahan sistim pendidikan terutama dengan perubahan kurikulum. Akhir-akhir ini diadakan pula pembaharuan pendidikan dengan menampilkan Sekolah Pembangunan Perintis yang dipercayakan kepada 8 IKIP di seluruh Tanah Air di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Usaha pembaharuan yang terakhir ini tertera dalam Master Design Pembaharuan Pendidikan di Indonesia melalui Proyek-Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Dalam Master Design tersebut terdapat 4 masalah pokok :

I. Masalah relevansi dengan aspek-aspek :....

II. Masalah kualitas dengan aspek-aspek :....

- Metode penyusunan kurikulum
- Organisasi kurikulum
- Materi kurikulum
- Administrasi kurikulum
- Sistem kredit
- Struktur vertikal
- Struktur horisontal :
 - sistem departementalisasi
 - sistem guru kelas
 - sistem pengajaran beregu.
-

III. Masalah efisiensi dengan aspek-aspek:.....

IV. Masalah pemerataan dengan aspek-aspek:....

(Master Design Pembaharuan Pendidikan di Indonesia , BP3K Departemen P dan K, 1975, 82).

Dengan memperhatikan Master Design tersebut di atas, masalah organisasi kelas adalah suatu aspek yang memungkinkan merubah Sistem Pendidikan Nasional khususnya untuk tingkat SD. Demikian juga halnya dengan penerapan sistem guru bidang di SD yang telah menjadi salah satu alternatif yang direkomendasikan dan telah mulai diterapkan di SD PPSP IKIP Bandung dan Semarang dan telah ada keinginan untuk diterapkan di ke 5 SD PPSP lainnya, yaitu di Ujung Pandang, Malang, Surabaya Yogyakarta dan Jakarta. (Wawancara dengan pimpinan - pimpinan PPSP 1974). Keadaan tersebut memberikan gambaran selintas bahwa guru bidang merupakan salah satu alternatif yang kuat untuk diterapkan di SD-SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan sebagai proyek nasional.

2.2. Tinjauan secara Administrasi Pendidikan terhadap sistim guru kelas dan sistim guru bidang di SD.

Penerapan sistim guru bidang dan kemungkinannya di SD mempunyai hubungan langsung dengan Administrasi Pendidikan. Administrasi Pendidikan dalam arti suatu bidang studi yang mempelajari tentang bagaimana pengaturan atau pengadministrasian orang-orang, alat-alat, dan usaha-usaha untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan bagaimana memberikan suasana belajar-mengajar yang baik bagi orang-orang yang turut serta dalam mencapai tujuan sekolah. Salah satu wadah untuk mengadministrasikan kegiatan-kegiatan tersebut yaitu organisasi kelas. Sehubungan dengan organisasi kelas, yang dimaksud dengan orang-orang terutama guru-guru dan pimpinan sekolah sebagai pengadministrasi pengajaran, murid-murid yang menjalani proses belajar dan orang tua murid yang menitipkan anak-anaknya kepada sekolah. Alat-alat yaitu kurikulum dan pengajaran, yang secara terbatas kurikulum meliputi bidang studi - bidang studi, kegiatan dan fasilitas yang disediakan untuk mencapai tujuan sekolah. Adapun usaha-usaha terutama berkenaan dengan bimbingan dan penyuluhan murid-murid. Semua itu secara Administrasi Pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam Administrasi Ketenagaan, Administrasi Kurikulum dan Administrasi Bimbingan Murid. Secara singkat pengadministrasian itu adalah sebagai berikut :

Administrasi Ketenagaan (Administrasi Guru)

Ketenagaan yang dimaksud dalam hubungan dengan organisasi kelas SD terutama tenaga guru. Hal ini dikarenakan bahwa mereka adalah petugas pengajaran yang inti yang mempunyai hubungan langsung baik dengan murid-murid, guru-guru lain maupun dengan pimpinan sekolah dan dengan para o-

rang tua murid. Guru-guru yang bekerja pada sekolah yang menerapkan sistim guru kelas, direncanakan untuk menjadi guru yang akan mengajarkan semua mata pelajaran. Mereka mendapat pendidikan umum sebagai syarat kewarganegaraan, pendidikan keguruan dan semua mata pelajaran yang akan diajarkan secara umum. (Pedoman Kerja Sekolah Pendidikan Guru, DPPT Dep. P dan K, 1969/1970). Pelaksanaan penempatan tenaga mereka di sekolah-sekolah cukup memperhatikan lowongan kerja. Mereka di pandang harus dapat mengajarkan semua mata pelajaran pada kelas mana saja di SD. Mereka yang telah bekerja dan apabila hendak ditingkatkan, misalnya untuk mengajar di kelas I atau II, mereka perlu ditatar sesuai dengan maksud tersebut yaitu ditatar dalam semua mata pelajaran untuk menjadi guru kelas I atau II. Berbeda dengan guru yang bekerja pada sekolah yang menerapkan sistim guru bidang, mereka direncanakan untuk dapat mengajarkan satu atau dua mata pelajaran atau bidang studi kepada beberapa kelas. Mereka memperoleh pendidikan umum sebagai syarat kewarganegaraan, pendidikan keguruan dan berbagai bidang studi pada umumnya, tetapi mereka mendapat pendidikan khusus untuk mengajarkan bidang studi tertentu. Pelaksanaan penempatan tenaga mereka tidak hanya didasarkan atas lowongan kerja saja tetapi memperhitungkan pula untuk mengajarkan bidang studi apa guru yang diperlukan pada sekolah tertentu itu. Demikian juga mereka yang telah bekerja, apabila hendak ditingkatkan selain ditatar dalam bidang studi-bidang studi secara umum, juga perlu mendapat pendidikan khusus dalam bidang studi yang dipercayakan kepadanya. Ini berarti adanya perbedaan pengadministrasian tenaga guru antara penerapan sistim guru kelas dengan sistim guru bidang di SD.

Administrasi Kurikulum dan Pengajaran

Pada dasarnya terdapat 2 bentuk organisasi kurikulum. Pertama, kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran - mata pelajaran yang terpisah-pisah atau disebut "subject centered curriculum". Kedua, kurikulum yang terdiri dari satu-an-satuan pelajaran yang di dalamnya menyangkut berbagai aspek. Dalam kurikulum tersebut tidak tampak lagi batas-batas antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Kurikulum semacam itu disebut "integrated curriculum". Di antara kedua bentuk organisasi kurikulum tersebut, terdapat kurikulum yang berbentuk "correlated, broad field atau core, (Beauchamp, 1956, 29).

Pada umumnya, SD - SD menggunakan organisasi kurikulum yang pertama yang mengarah ke organisasi kurikulum yang "integrated". Dalam perkembangan tersebut, kurikulum SD di Indonesia dewasa ini, khususnya Kurikulum SD PPSP berbentuk "broad field" yaitu kurikulum yang terdiri dari bidang studi-bidang studi yang merupakan perpaduan dari mata pelajaran-mata pelajaran yang sejenis. Misalnya Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Bahasa, Pendidikan Agama dan lain-lain.

Pengadministrasian kurikulum tersebut di sekolah di antaranya diadakan penjadwalan atas dasar bidang studi-bidang studi yang bersangkutan. Misalnya pada jam pelajaran pertama dan kedua Ilmu Pengetahuan Alam, ketiga dan keempat Bahasa Daerah, kelima dan keenam Seni Suara. Tampaknya, dalam penjadwalan antara penerapan kedua sistem tidak terdapat perbedaan tetapi sebenarnya sangat berbeda sekali terutama dalam tugas dan tanggung jawab guru. Pada sekolah yang menerapkan sistem guru kelas, guru kelaslah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengajarkan semua pe-

lajaran atau bidang studi yang ada dalam kurikulum untuk suatu kelas tertentu dan kemudian dituliskan ke dalam bentuk penjadwalan tertentu untuk kelas yang bersangkutan. Kurikulum untuk kelas tertentu itu berada di satu tangan yaitu guru kelas. Pada kelas yang menerapkan sistem guru bidang, tugas dan tanggung jawab mengajarkan bidang studi-bidang studi itu terletak pada guru-guru dan di koordinasikan oleh sekolah secara keseluruhan dan hal-hal yang khusus oleh wali kelas.

Administrasi Bimbingan dan Penyuluhan

Pada dasarnya bimbingan dan penyuluhan di suatu sekolah, diperuntukkan bagi semua murid. Namun demikian, bimbingan yang diperlukan setiap murid berbeda satu sama lain. Hal ini sangat dipengaruhi oleh masalah yang dialami setiap murid. Karena itu, pada umumnya prioritas bimbingan diberikan kepada murid-murid yang mengalami kesulitan belajar, terutama kesulitan belajar dalam bidang pendidikan.

Dalam suatu kelompok murid yang normal, adalah hal yang wajar apabila terdapat murid-murid yang mempunyai prestasi belajar yang tinggi, sebagian besar biasa dan sebagian kecil yang berprestasi kurang. Dapat juga dikatakan ada murid-murid yang cepat belajar, biasa dan lambat. Kadang-kadang murid yang lambat atau berprestasi kurang dikatakan bahwa murid semacam itu mengalami kesulitan belajar. Mereka yang mendapat kesulitan belajar itu di antaranya tampak mendapat angka rendah, baik secara keseluruhan maupun dalam bidang studi-bidang studi tertentu. Pada umumnya mereka yang mendapat kesulitan belajar itu tidak dalam semua bidang studi. Kadang-kadang memperoleh angka rendah dalam Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika tetapi bernilai tinggi dalam Pendidikan Olah Raga atau Seni Suara atau se-

baliknya. Dalam keadaan demikian selayaknya murid - murid yang mendapat kesulitan belajar itu mendapat bimbingan khusus supaya mereka memperoleh prestasi belajar yang lebih baik.

Bimbingan dan penyuluhan di SD, sampai saat ini masih diadministrasikan oleh guru kelas. Apabila sekolah menerapkan sistim guru bidang, bimbingan dan penyuluhan diadministrasikan oleh wali kelas. Pada sekolah yang menerapkan sistim guru kelas, murid-murid yang mengalami kesulitan belajar ditangani guru kelas terutama kesulitan belajar yang menyangkut bidang studi-bidang studi. Tetapi dalam hal-hal tertentu guru kelas menyerahkan mereka yang mengalami kesulitan belajar itu kepada guru lain yang lebih tahu atau lebih menguasai bagaimana membimbing murid yang bersangkutan dalam bidang studi tertentu. Di kelas yang menerapkan sistim guru bidang, apabila wali kelas menemukan murid yang mengalami kesulitan belajar yang bukan mengenai bidangnya, ia menyerahkannya kepada guru yang mengajarkan bidang studi yang bersangkutan. Guru yang mengajar bidang studi yang bersangkutan itupun kadang-kadang telah mengetahui bahwa murid yang diserahkan wali kelas itu sedang mengalami kesulitan belajar dalam bidang studi yang diajarkan guru yang diserahi untuk membimbing murid yang mengalami kesulitan belajar itu. Ini berarti adanya perbedaan pengadministrasian dalam pembimbingan murid yang mengalami kesulitan belajar dalam bidang studi-bidang studi sekalipun terdapat persamaan yaitu kadang-kadang baik guru maupun wali kelas menyerahkan pembimbingan murid yang mengalami kesulitan belajar kepada guru yang dipandang lebih menguasai dalam mengajarkan bidang studi tertentu. Implikasi dari keadaan tersebut, di antaranya bahwa di SD diperlukan adanya guru yang lebih menguasai dalam mengajarkan bidang

studi tertentu, supaya mereka itu dapat memberikan bimbingan yang lebih baik kepada murid-murid yang mengalami kesulitan belajar dalam bidang studi tertentu pula.

Dengan memperhatikan ketiga komponen persekolahan tersebut di atas, secara Administrasi Pendidikan, ada perbedaan pengadministrasian antara sekolah yang menerapkan sistim guru kelas dengan sekolah yang menerapkan sistim guru bidang, sekalipun tidak menimbulkan perbedaan jumlah guru pada sekolah yang lengkap yang terdiri atas 5 atau 6 kelas yang mempunyai kelas yang sama jumlahnya di suatu SD. Sebagai gambaran tidak adanya perbedaan jumlah guru, ada baiknya di bawah ini dikemukakan sebuah contoh.

Di SD unit I dan II PPSP IKIP Bandung yang terdiri dari 5 kelas yaitu kelas satu sampai dengan kelas lima masing-masing tingkat satu kelas. Bila menerapkan sistim guru kelas, guru yang diperlukan minimal 5 orang dan seorang guru Pendidikan Agama. Guru-guru tersebut mempunyai tugas mengajar antara 26 sampai dengan 38 jam pelajaran tiap minggu. Bila menerapkan sistim guru bidang, diperlukan juga lima orang guru yang pembagian tugasnya sebagai berikut: Seorang guru yang mengajarkan Bahasa Indonesia 30 jam dan Bahasa Daerah 8 jam, jumlah 38 jam pelajaran seminggu. Seorang guru yang mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam 16 jam, Teknik 6 jam dan Bahasa Inggris 4 jam, jumlah 26 jam pelajaran. Seorang guru yang mengajarkan Ilmu Pengetahuan Sosial 16 jam, Pertanian dan Peternakan 12 jam dan pelajaran tambahan 5 jam, jumlah 33 jam pelajaran. Seorang guru yang mengajarkan Matematika 30 jam dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 8 jam, jumlah 38 jam pelajaran seminggu. Seorang guru yang mengajarkan Kesenian 20 jam, Pendidikan Olah Raga 10 jam dan pelajaran tambahan 5 jam, jumlah 35 jam pelajaran seminggu. Sudah barang tentu seorang guru Pendidikan

Agama. Tugas mengajar dengan menerapkan sistim guru bidang berkisar antara 26 sampai dengan 38 jam pelajaran seminggu. Ini berarti tidak terdapat perbedaan jumlah guru dan tugas mengajar antara penerapan sistim guru bidang dengan sistim guru kelas di sekolah yang mempunyai 5 kelas tetapi sangat berbeda pengadministrasiannya.

2.3. Studi terdahulu tentang sistim guru bidang di SD.

Tinjauan ketiga tentang studi sistim guru bidang di SD ialah berdasarkan pada hasil beberapa studi terdahulu, yang secara singkat adalah sebagai berikut.

Di SD-SD yang menerapkan sistim kelas, secara garis besar terdapat tiga jenis organisasi kelas yaitu sistim guru kelas, sistim guru bidang dan sistim pengajaran beregu (Master Design Pembaharuan Pendidikan melalui PPSP, 1975, 92). Sistim guru kelas atau sistim borongan atau disebut juga "self-contained classroom" atau "single - teacher - per-grade" yaitu suatu organisasi kelas yang terdiri dari sejumlah murid dalam suatu kelas tertentu yang diajarkan oleh seorang guru utama dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran, kecuali Pendidikan Agama, kadang-kadang Kesehatan dan Pendidikan Olah Raga, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya selama satu caturwulan. Sistim departementalisasi atau sistim bagian atau sistim guru mata pelajaran atau sistim guru bidang yaitu suatu organisasi kelas yang terdiri dari sejumlah murid dalam suatu kelas tertentu yang diajarkan oleh beberapa orang guru masing - masing dalam mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam waktu satu caturwulan. Dalam sistim departementalisasi kadang-kadang seorang guru mengajarkan satu, dua atau tiga bidang studi kepada beberapa kelas. Ada kalanya guru berpindah tempat atau kelas dan murid tetap dalam kelas tertentu atau seba-

liknya. Adapun sistim pengajaran beregu atau "team teaching" yaitu suatu organisasi kelas yang terdiri dari sejumlah murid yang mungkin berbeda tingkat atau kemampuannya dalam suatu kelas tertentu, diajar oleh beberapa orang guru dalam berbagai bidang studi yang merupakan suatu "team" dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam waktu satu caturwulan.

Pada lazimnya, SD-SD menerapkan sistim guru kelas, sistim departementalisasi terbatas sekali, demikian juga sistim pengajaran beregu masih sangat terbatas sekali. Kedua jenis organisasi kelas yang disebut terakhir itu penerapannya masih dalam taraf pelengkap dan percobaan. Dalam tulisan ini uraian dibatasi pada sistim guru bidang dibandingkan dengan sistim guru kelas yang berlaku di SD dewasa ini, sedangkan sistim pengajaran beregu tidak dibicarakan.

Sistim guru bidang itu sendiri merupakan istilah baru sebagai perubahan sistim departementalisasi. Perkataan bidang studi paralel dengan istilah bidang studi yang terdapat dalam kurikulum di Indonesia dewasa ini (Kurikulum SD, PPSP IKIP Bandung, 1974) (Kurikulum SD, Departemen P dan K, 1975). Hal ini seperti juga pada istilah sistim guru mata pelajaran, sejalan dengan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran-mata pelajaran. Dengan perkataan lain, sistim departementalisasi dapat juga disebut sistim guru mata pelajaran, sistim guru bidang atau sistim lain asalkan berdasarkan isi kurikulum yang terdiri dari bagian-bagian. Karena itu dalam mengemukakan studi terdahulu tentang sistim guru bidang banyak dijumpai istilah sistim departementalisasi.

Penerapan sistim departementalisasi di SD bukanlah hal yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Monroe dalam Educational Research bahwa sejak akhir abad ke 18 telah diterapkan di kota New England. Sekolah di situ terdiri dari ke-

las membaca dan kelas menulis. Tiap-tiap kelas mempunyai kepala, sejumlah guru tersendiri, program, ruangan beserta fasilitas tersendiri pula. Murid-murid berpindah tempat atau kelas setelah setengah hari sekolah.

Di New York sistim departementalisasi mulai diterapkan di SD pada tahun 1900. Tahun 1913 telah terdapat 461 SD yang menerapkannya. Tahun 1921 bertambah menjadi 1068 sekolah yang tersebar di 202 kota atau di 41 negara bagian di Amerika Serikat.

Dalam perkembangan yang demikian itu terdapat juga orang-orang yang mengadakan studi tentang kemampuan atau kekurangan sistim tersebut di SD. Studi pertama dilakukan tahun 1923 tentang kemajuan prestasi belajar murid-murid. Hasilnya menunjukkan bahwa murid-murid kelas V dan kelas VIII memperoleh nilai yang lebih tinggi pada sistim guru kelas dibandingkan dengan yang menerapkan sistim departementalisasi, sekalipun tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Tujuan tahun berikutnya yaitu tahun 1930 diadakan pula studi yang serupa. Hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan yang berarti antara penerapan sistim departementalisasi dengan sistim non-departementalisasi terhadap prestasi belajar murid kelas IV, V dan VI.

Tahun 1941 Prince dan Huffman mengiriakan sejumlah angket kepada 200 sekolah. Hal yang serupa dilakukan pula tahun 1945 terhadap 154 sekolah yang pada tahun 1941 telah diteliti. Hasilnya menunjukkan bahwa 68% di antara mereka tidak lagi menerapkan sistim departementalisasi.

Tahun 1943, Herry J. Otto di Texas, mengadakan studi terhadap 532 sekolah umum dan 46 sekolah khusus yang menerapkan sistim departementalisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa 66 % dari sekolah-sekolah tersebut telah menerapkan sistim departementalisasi mulai Taman Kanak-Kanak sampai de-

ngan kelas VIII, dan 55 % mulai dari kelas I SD. Selanjut - nya dikemukakan pula bahwa tidak terdapat perbedaan statis- tik yang berarti mengenai prestasi belajar murid-murid di antara sekolah yang menerapkan sistim departementalisasi pa da 200 sekolah di Texas, 286 sekolah Non-Texas dan pada 46 sekolah yang disediakan untuk menerapkan sistim tersebut.

Tahun 1945, Margaret R. Rouse di Texas pula, memban - dingkan antara sekolah yang menerapkan sistim departementa- lisasi dengan yang non-departementalisasi. Studi berkisar pada "the scope of the curricullum, the general pattern of the curricullum organization, the way the program of school life was administered and the procedures used in classroom teaching". Hasilnya menunjukkan bahwa sistim non-departemen- talisasi lebih disukai dalam arti lebih mudah diatur dari pada sistim departementalisasi.

Tahun 1960, Chester W. Harris dalam Educational Re- search melaporkan dua studi. Pertama, hasil studi Richard Hansen pada tahun 1953 di Universitas Iowa. Ia mengadakan survai dengan jalan menanyakan kepada guru-guru yang menga- jarkan "Art, Music and Physical Education". Hasilnya menun- jukkan bahwa 50 % di antara mereka lebih suka sistim guru kelas dikarenakan bahwa mereka tidak siap mengajarkan bi- dang studi-bidang studi tersebut. Tetapi mereka yang siap, lebih menyukai sistim departementalisasi. Kedua, Charles T. Hosley pada tahun 1954, membandingkan prestasi belajar 200 murid kelas VI SD yang menerapkan sistim "semi-Departementa- lisasi" dengan yang non-departementalisasi. Hasilnya memper-lihatkan bahwa prestasi belajar murid-murid yang belajar pa- da sistim non-departementalisasi mempunyai kemajuan presta- si belajar yang lebih tinggi sekalipun tidak menunjukkan perbedaan statistik yang berarti. Demikian juga tidak terda- pat perbedaan yang berarti mengenai tingkah laku murid- mu-

rid dalam "preference records", tetapi murid-murid yang belajar pada sekolah yang menerapkan sistim departementalisasi sangat baik dalam membaca dan memiliki lebih banyak kegiatan dan "hobbies".

Tahun 1967, Glen Hass dan Kimball Wiles dalam Readings in Curricullum melaporkan pula dua buah studi. Pertama, studi George D. Stoddard, Chencellor Universitas New York, mengadakan studi perbandingan pada kelas III sampai dengan kelas VI dan kelas VII-VIII di Long Beach dan Ossining New York antara sekolah yang menerapkan sistim departementalisasi dengan yang non-departementalisasi. Pada sistim departementalisasi, murid-murid pindah tempat sesuai dengan departemen yang bersangkutan. Hasilnya menunjukkan bahwa data yang diperoleh dengan "Inventory Personality" tidak menunjukkan adanya kerugian atau keuntungan terhadap murid-murid baik yang bersifat emosional maupun sosial. Tidak terdapat pula perbedaan yang berarti mengenai prestasi belajar murid-murid yang diukur dengan "standardized test". Murid-murid kelas III sampai dengan kelas VI lebih menyenangi sistim departementalisasi terutama dikarenakan adanya pergantian guru. Tetapi banyak murid-murid yang mengeluh karena kehilangan bangku dan meja yang diinginkan apabila mereka datang atau pindah tempat terlambat. Selain dari itu beberapa orang tua murid melaporkan bahwa anak-anak mereka lebih giat belajar dengan berbagai guru dari pada dengan seorang guru. Kedua, studi Robert S. Flemming dengan kawan-kawannya. Mereka mempelajari reaksi guru-guru terhadap sistim departementalisasi di SD. Hasilnya menggarbarkan bahwa ada guru-guru yang setuju dan yang tidak. Alasan mereka masih bersifat hipotetis.

Berkenaan dengan studi terdahulu tentang sistim departementalisasi di SD yang telah dirangkumkan tersebut di a-

tas, terdapat beberapa saran yang dikemukakan.

Monroe dalam Educational Research menyarankan bahwa masalah yang perlu diselidiki meliputi : "economy in equipment and supplies, the effect on pupil interest, effort and continuity of application, and the effect on the nature of instructional program".

Harris dalam Educational Research mengemukakan bahwa studi tentang sistim departementalisasi di Sekolah Dasar, hasilnya belum menunjukkan keampuhannya baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan, sehingga masih banyak dan terus diselidiki.

Glen Hass dan Kimball Wiles dalam Readings in Curriculum, berpendapat bahwa sistim departementalisasi di SD masih memerlukan studi lebih lanjut dan seksama terutama secara "experimental" yang sengaja diadakan.

2.4. Suatu Pendapat

Ditinjau dari ketiga sudut pandangan tersebut di atas, studi tentang sistim departementalisasi atau dalam tulisan ini ditulis sistim guru bidang di SD, khususnya di Indonesia, merupakan masalah nasional. Secara administratif penerapan sistim guru bidang akan memberi corak yang berbeda dengan sistim guru kelas yang diterapkan dewasa ini. Tetapi sejauh mana perbedaan itu akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan penciptaan suasana belajar-mengajar belum diketahui sekalipun telah terdapat studi-studi tentang sistim yang sejenis di Amerika. Studi-studi yang telah dilakukan lebih banyak pada sekolah-sekolah yang sedang menerapkan sistim tersebut dan sedikit sekali yang sengaja diadakan untuk diselidiki. Sekolah yang sengaja diselidiki terbatas pada kelas-kelas tinggi, sedangkan sistim yang diterapkan di Indonesia yaitu di SD PPSP Bandung dan Semarang, mulai di kelas I. Ke

terangan yang menyangkut sasaran tersebut kurang sekali dan khusus di Indonesia belum ada. Karena itu, dianggap perlu dan baru diadakan studi tentang sistim guru bidang dibandingkan dengan sistim guru kelas, khususnya di Indonesia, terutama yang menyangkut sampel kelas-kelas rendah atau unit I yaitu kelas I, II dan III SD (Unit I adalah istilah yang dipergunakan untuk kelas I, II dan III SD).

3. Sistim Organisasi Kelas Yang diterapkan

Organisasi kelas sebagai suatu sistim terdiri dari beberapa komponen yang bertautan satu sama lain. Komponen-komponen utama meliputi murid-murid sebagai "raw input", guru-guru, kurikulum, waktu dan fasilitas sebagai "instrumental input", sedangkan murid yang telah mengalami proses pengajaran dalam aspek-aspek tertentu sebagai "out-put". Komponen-komponen tersebut merupakan variabel-variabel yang dapat memberikan berbagai variabel tentang suatu sistim. Karena itu sistim yang diterapkan dalam studi ini dibatasi kepada hal-hal sebagai berikut.

3.1. Sistim Guru Kelas.

Sistim guru kelas diterapkan di kelas II dan III.

3.1.1. Sistim guru kelas di kelas II

- a). Murid : 32 orang
- b). Guru : Seorang guru kelas II, berlaku juga sebagai wali kelas.
- c). Kurikulum:
 - 1). Pendidikan Agama 2 jam
 - 2). Bahasa Indonesia 6 jam

| | |
|--------------------------------------------|--------|
| 3) Bahasa Daerah | 1 jam |
| 4) Ilmu Pengetahuan Alam | 2 jam |
| 5) Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 jam |
| 6) Matematika | 6 jam |
| 7) Pendidikan Kesenian | 4 jam |
| 8) Pendidikan Olah Raga | 2 jam |
| 9) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 1 jam |
| 10) Tambahan | 2 jam |
| ----- | |
| Jumlah | 28 jam |

seminggu untuk tiap caturwulan.

d) Program Pengajaran :

Program Pengajaran menggunakan program SD PPSP IKIP Bandung tahun 1974, dengan sistim persiapan mingguan dalam bentuk PPSI

e) Waktu dan fasilitas :

Sekolah diselenggarakan pagi hari dengan dua gelombang.

Gelombang pertama 7.00 - 10.15 dan kedua 10.30 - 13.45. Tiap jam pelajaran berlangsung 30 menit. Selang seminggu kelas bergilir antara gelombang pertama dan kedua pada tempat yang sama.

3.1.2 Sistia Guru Kelas di Kelas III

- a) M u r i d : 32 orang
- b) G u r u : Seorang guru kelas III, berlaku juga sebagai wali kelas.
- c) Kurikulum :
- | | |
|---------------------------|-------|
| 1) Pendidikan Agama | 2 jam |
| 2) Bahasa Indonesia | 6 jam |

| | |
|--------------------------------------------|--------|
| 3) Bahasa Daerah | 1 jam |
| 4) Ilmu Pengetahuan Alam | 4 jam |
| 5) Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 jam |
| 6) Matematika | 6 jam |
| 7) Pendidikan Olah Raga | 2 jam |
| 8) Pendidikan Kesenian | 4 jam |
| 9) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 1 jam |
| 10) Tambahan | 2 jam |
| ----- | |
| Jumlah | 32 jam |

seminggu untuk tiap caturwulan.

d) Program Pengajaran :

Program Pengajaran mempergunakan program SD PPSP IKIP Bandung tahun 1974, dengan sistim persiapan mingguan dalam bentuk PPSI.

e) Waktu dan fasilitas :

Pendidikan diselenggarakan pagi hari dari jam 7.00 - 13.00. Tiap jam pelajaran berlangsung 45 menit. Ruang yang dipergunakan ialah sebuah kelas tersendiri dengan perlengkapan tersendiri pula.

3.2. Sistim guru bidang

Sistim guru bidang diterapkan di kelas II dan III.

3.2.1 Sistim guru bidang di kelas II

- a) M u r i d : 32 orang
- b) G u r u : 1. Seorang guru Pendidikan Agama
2. Seorang guru Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.
3. Seorang guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Pendidikan Kese-

jahteraan Keluarga.

4. Seorang guru Ilmu Pengetahuan Sosial dan Matematika.
5. Seorang guru Pendidikan Olah Ra-ga dan Seni Suara.
6. Seorang guru Ketrampilan dan Se-ni Suara.

Salah seorang guru tersebut di atas menjadi wali kelas.

c) Kurikulum :

Sama dengan kurikulum yang dipergunakan pada sis-tim guru kelas untuk kelas II.

d) Program Pengajaran :

Sama dengan Program Pengajaran yang dipergunakan pada sistim guru kelas untuk kelas II.

e) Waktu dan Fasilitas :

Sama dengan waktu dan fasilitas pada sistim guru kelas untuk kelas II

3.2.1 Sistim guru bidang di kelas III

- a) M u r i d : 32 orang
- b) G u r u :
 1. Seorang guru Pendidikan Agama
 2. Seorang guru Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
 3. Seorang guru Ilmu Pengetahuan A-lam dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.
 4. Seorang guru Ilmu Pengetahuan Soal dan Matematika.
 5. Seorang guru Pendidikan Olah Ra-ga dan Seni Suara.

6. Seorang guru Ketrampilan dan
Seni Rupa

Salah seorang guru tersebut di
atas menjadi wali kelas.

c) Kurikulum :

Sama dengan kurikulum yang dipergunakan pada sis-
tim guru kelas untuk kelas III.

d) Program Pengajaran :

Sama dengan program pengajaran yang dipergunakan
pada sistim guru kelas untuk kelas III.

e) Waktu dan fasilitas :

Sama dengan waktu dan fasilitas pada sistim guru
kelas untuk kelas III.

Perlu dikemukakan disini bahwa guru-guru yang bertu-
gas di kedua kelas yang menerapkan sistim guru bidang, me-
ngajar juga di kelas I, IV dan V kelas lainnya sehingga tu-
gas mengajar tiap-tiap guru mempunyai jumlah jam mengajar
yang sama dengan kedua orang guru yang mengajar di kelas
yang menerapkan sistim guru kelas.

Adapun penerapan sistim guru bidang dalam studi ini
dilaksanakan dengan cara guru-guru berpindah tempat (kelas)
dan murid-murid tetap berada di kelas masing-masing.